

Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H.

PRAKTIK PERADILAN PERDATA, KEPAILITAN, DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

EDISI KEDUA



Penerbit

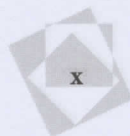
SINAR GRAFIKA

Daftar Isi

BAB 1	PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN	1
A.	Pengertian Gugatan	1
B.	Gugatan <i>Contentiosa</i> dan <i>Voluntair</i>	4
C.	Perbedaan Antara <i>Contentiosa</i> dan <i>Voluntaria</i>	10
D.	Gugatan Permohonan atau Gugatan <i>Voluntair</i>	12
E.	Bentuk Surat Gugatan	18
F.	Dasar Hukum	19
G.	Jenis dan Susunan Badan Peradilan di Indonesia	22
H.	Pengadilan Khusus dan Absolut	29
I.	Kewenangan Pengadilan	33
J.	Kewenangan Pengadilan Tinggi	34
K.	Kewenangan Mahkamah Agung	35
L.	Tempat Kedudukan Pengadilan	37
M.	Susunan Pejabat Pada Suatu Pengadilan	38
N.	Tugas dan Fungsi Panitera	38
O.	Juru Sita	39
P.	Yang Dianggap Tidak Mampu	39
Q.	Badan-Badan Hukum sebagai Pihak	39
BAB 2	LANGKAH-LANGKAH MENYUSUN GUGATAN	41
A.	Penelaahan Data dan Analisis Kasus	41
B.	Bentuk dan Sifat Sengketa	44
C.	Sifat Perselisihan/Sengketa	45

D. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Sikap Para Pihak dalam Sengketa dan Cara Penyelesaian.....	46
E. Opini Hukum (<i>Legal Opinion</i>)	47
F. Langkah-Langkah Melakukan <i>Legal Opinion</i>	49
G. Format atau Bentuk <i>Legal Opinion</i>	50
H. Fungsi <i>Legal Opinion</i>	52
I. Penyampaian <i>Legal Opinion</i>	52
J. Hal-Hal Pokok dalam Pemeriksaan Gugatan	53
K. Identitas Para Pihak	54
L. <i>Fundamentum Petendi/Posita</i> Gugatan.....	55
M. Menyusun <i>Posita</i>	57
N. <i>Petitum</i> Gugatan atau Tuntutan.....	58
O. Pokok-Pokok Tuntutan dalam <i>Petitum</i>	60
P. Jenis-Jenis <i>Petitum</i> di Dalam Gugatan Perdata	63
Q. Gugatan yang Dapat Diterima	65
R. Tempat dan Tanggal Surat Gugatan	66
S. Judul Surat Gugatan	67
T. Eksepsi	67
1. Eksepsi Absolut	67
2. Eksepsi Relatif	68
3. Eksepsi terhadap Kompetensi Relatif	71
4. Eksepsi terhadap Kompetensi Absolut	71

BAB 3 PIHAK-PIHAK DALAM GUGATAN	72
A. Subjek dalam Gugatan	72
B. Pihak Penggugat	73
1. Orang Pribadi (<i>Natuurlijk Person</i>)	73
2. Mereka yang Belum Dewasa	74
3. Mereka yang Berada di Bawah Pengampunan.....	75
4. Penggugat Badan Hukum (<i>Recht Person</i>).....	76
5. Penggugat yang Mewakili Badan Usaha atau Persekutuan yang Bukan Badan Hukum	77
C. Pihak Tergugat	77
1. Orang Pribadi (<i>Natuurlijk Person</i>)	78
2. Tergugat yang Belum Dewasa	78
3. Tergugat yang Berada di Bawah Pengampunan.....	79



4.	Tergugat Badan Hukum (<i>Recht Person</i>)	80
5.	Tergugat yang Mewakili Badan Usaha atau Perse- kutuan yang Bukan Badan Hukum	80
D.	Turut Tergugat	81
E.	Turut Penggugat	82
F.	Teknik Menentukan Tergugat	83
BAB 4	KUASA PARA PIHAK	84
A.	Lembaga Kuasa dan Kuasa Hukum	84
B.	Pemberian Kuasa	87
C.	Berakhirnya Kuasa	88
D.	Jenis Kuasa	89
E.	Kuasa Menurut Hukum	90
F.	Bentuk Kuasa di Depan Pengadilan	92
G.	Tidak Ada Keharusan untuk Mewakillkan	94
H.	Objek-Objek Materiil Gugatan	96
I.	Dasar Gugatan	98
J.	Ingkar Janji (<i>Wanprestasi</i>).....	98
K.	Perbuatan Melawan Hukum (<i>Onrechtmatige Daad</i>)	99
L.	Hak Kebendaan Mengenai Hak Milik	101
M.	Perceraian	101
N.	Pembagian Harta Bersama	101
O.	Hak Mengasuh Anak	103
P.	Pembagian Harta Warisan	103
BAB 5	SYARAT-SYARAT GUGATAN DAN JALANNYA PER- SIDANGAN	105
A.	Syarat-Syarat Gugatan	105
1.	Penyusunan Surat Gugatan	105
2.	Penggabungan Gugatan	106
3.	Beberapa Ketentuan Penggabungan	107
4.	Perubahan dan Pencabutan Gugatan	108
5.	Perubahan Surat Gugatan	109
B.	Proses Jalannya Persidangan	110
1.	Pendaftaran Gugatan	110
2.	Persiapan Sidang	113
3.	Susunan Persidangan	114

C. <i>Verstek</i> dan <i>Verzet</i>	117
1. <i>Verstek</i>	117
2. <i>Verzet</i>	118
3. Pemeriksaan Perlawanan (<i>Verzet</i>)	120
4. Beban Pembuktian dalam Putusan <i>Verzet</i> /Perlawanan	121
5. Putusan Perlawanan	121
6. Bagaimanakah Putusan Mahkamah Agung RI terhadap <i>Verzet</i> Atas Putusan Perdata yang Sudah Di- <i>executie</i>	122
D. Beberapa Kemungkinan yang Terjadi dalam Proses Persidangan	122
1. Proses Peradilan di Pengadilan Negeri	123
2. Proses Banding di Pengadilan Tinggi	123
3. Proses Kasasi di Mahkamah Agung.....	124
4. Tugas Hakim dalam Pelaksanaan Fungsi Peradilan	125
E. Sistem Kontradiktoir (<i>Contradictoir</i>)	126
F. Prinsip dalam Pemeriksaan di Persidangan	127
1. Pembuktian oleh Pihak Berperkara	127
2. Kebenaran Formil	128
3. Pemeriksaan Secara Terbuka dan Seimbang	128
4. Pemeriksaan Setempat	129

BAB 6 JAWABAN TERGUGAT, PEMBUKTIAN, DAN UPAYA MENJAMIN HAK	131
A. Jawaban Tergugat.....	131
1. Pendahuluan	131
2. Jawaban	131
3. Dalam Pokok Perkara	133
4. Permohonan atau <i>Petitum</i>	134
B. Rekonvensi	134
C. Pembuktian (Pasal 162–176 HIR dan Pasal 1865–1945 KUH Perdata)	136
D. Pengertian Pembuktian/Membuktikan	138
E. Teori Penilaian Pembuktian	140
F. Teori Beban Pembuktian	141

G. Bukti Tulisan sebagai Alat Bukti	142
1. Akta Autentik (Pasal 165 HIR dan Pasal 1867–1874 a KUH Perdata)	143
2. Akta di Bawah Tangan	144
3. Surat-Surat Lainnya	145
H. Keterangan Saksi (Bukti Saksi)	146
I. Keterangan Ahli (Pasal 154 HIR)	147
J. Persangkaan (Pasal 173 HIR, Pasal 310 RBg, dan Pasal 1915–1922 BW)	148
K. Pengakuan (Pasal 174 HIR, Pasal 312 dan 313 RBg, Pasal 1923–1928 KUH Perdata)	150
L. Sumpah (Pasal 155–158, 177 HIR, Pasal 182–185, 314 RBg, dan Pasal 1929–1945 KUH Perdata)	151
BAB 7 PUTUSAN, UPAYA HUKUM, DAN EKSEKUSI	155
A. Putusan	155
1. Kepala Putusan	156
2. Nomor Register Perkara	156
3. Identitas Para Pihak	157
4. Duduk Perkara	157
5. Pertimbangan Hukumnya	158
6. Amar atau <i>Dictum</i>	158
7. Penandatanganan	158
B. Upaya Hukum	159
1. Banding	159
2. Kasasi	160
3. Peninjauan Kembali	161
4. Perlawanan Pihak Ketiga (<i>Derdenverzet</i>)	162
C. Eksekusi	165
D. Putusan Provisi atau Provisionil	165
E. Putusan Provisi	166
F. Antara Putusan Serta-Merta dengan Putusan Provisionil	168
1. Pelaksanaan Putusan Lebih Dahulu	168
2. Pelaksanaan Putusan Provisionil	168
3. Akta Perdamaian	169
4. Eksekusi dengan Dasar <i>Groose</i> Akta	170
5. Putusan yang Bersifat <i>Condemnatoir</i>	170

G. Jenis Pelaksanaan Putusan Eksekusi	170
1. Eksekusi dengan Membayar Sejumlah Uang	170
2. Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan	171
3. Eksekusi Riil	171
4. Eksekusi Putusan Hakim Perdata Berkekuatan Hukum Tetap yang Menyangkut Kewajiban Negara dan Badan Usaha Milik Negara	174
5. Eksekusi Putusan Akhir yang Berkekuatan Hukum Tetap	175
6. Saran-Saran	176
BAB 8 BENTUK SERTA SUBSTANSI GUGATAN DAN PUTUSAN PERDATA	177
A. Bentuk Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	178
B. Bentuk Gugatan Perceraian	188
C. Bentuk Permohonan Sita Jaminan	194
D. Bentuk Surat Kuasa	203
1. Contoh Surat Kuasa tentang Somasi	203
2. Contoh Surat Kuasa untuk Gugat Cerai	204
3. Contoh Surat Kuasa untuk Sidang Arbitrase	206
4. Contoh Surat Kuasa untuk Melakukan Bantahan	207
5. Contoh Surat Kuasa Permohonan Adopsi	209
BAB 9 SITA JAMINAN DAN EKSEKUSI	211
A. Sita Jaminan	211
1. Macam-Macam Sita Jaminan	215
2. Syarat Pengajuan Sita Jaminan	217
3. Pemohon Sita Jaminan	218
4. Objek Permohonan	218
5. Proses Permohonan Sita	219
6. Tahapan Pelaksanaan Sita	221
7. Pelaksanaan Sita	221
8. Setelah Pelaksanaan Sita	222
B. Eksekusi	222
1. Persiapan Sebelum Pelaksanaan Eksekusi	223
2. Pelaksanaan Eksekusi	223

3. Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Uang	224
4. Pelaksanaan Lelang Eksekusi	224
5. Contoh Permohonan Sita Eksekutorial	225
BAB 10 UPAYA PERLAWANAN	228
A. Perlawanan Pihak Tersita	228
B. Putusan "Perkara Perlawanan" tentang Kompetensi Absolut	230
1. Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 28/PDT.Plw/2007/PT.PLR, Tanggal: 7 Agustus 2007	232
2. Putusan Sela Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 03/Pdt.PLW/2007/PN.Spt	237
C. Tanggapan terhadap Putusan Perkara	286
BAB 11 ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA	288
A. <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR)	288
1. Konsultasi (<i>Consultation</i>)	289
2. Negosiasi	289
3. Mediasi	290
4. Konsiliasi (<i>Conciliation</i>)	290
B. Arbitrase	291
1. Tanggung Jawab Arbiter atau Majelis Arbitrase	294
2. Hukum Acara yang Berlaku di Hadapan Majelis Arbitrase	295
3. Pembatalan Putusan Arbitrase	296
C. Mediasi	297
1. Beberapa Prinsip dari Lembaga Mediasi	300
2. Makna Pentingnya Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa	304
D. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	305
BAB 12 GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION), GUGATAN ORGANISASI, DAN GUGATAN WARGA NEGARA	308
A. <i>Class Action</i> Sejarah dan Pengertiannya.....	308
B. Beberapa Kasus <i>Class Action</i> Nasional dan Internasional	311
C. Pengaturan, Mekanisme, dan Tujuan Gugatan <i>Class Action</i>	314

D. Manfaat Penggunaan Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok.....	318
E. Tata Cara Gugatan Perwakilan Kelompok.....	319
F. Syarat-Syarat Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok	320
G. Tahapan-Tahapan dalam Gugatan Perwakilan Kelompok	321
1. Pengajuan Surat Gugatan	321
2. <i>Fundamentum Petendi (Posita)</i>	322
3. Tuntutan atau <i>Petitum</i>	322
4. Proses Awal Pemeriksaan Perkara	324
5. Proses Pemberitahuan (Notifikasi)	324
6. Rumusan Pemberitahuan Gugatan Perwakilan	325
7. Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan	325
8. Putusan Hakim	326
9. Mekanisme Pendistribusian Ganti Rugi dalam Hal Gugatan Dikabulkan	326
H. Proses Sertifikasi atau Pemberian Izin	328
I. Pemberitahuan.....	328
J. Pemeriksaan dan Pembuktian dalam <i>Class Action</i>	331
K. Pelaksanaan Putusan.....	332
L. Perdamaian.....	333
M. Hak Gugat Organisasi (<i>Standings</i>)	333
1. Pengertian	334
2. Peraturan Perundang-undangan Mengenai Hak Gugat Organisasi	335
3. Syarat-Syarat dan Mekanisme Mengajukan Hak Gugat Organisasi	336
N. Gugatan Warga Negara (<i>Citizen Law Suit</i>)	337
1. Pengertian	338
2. Karakteristik Hak Gugat Warga Negara (<i>Citizen Law Suit</i>)	339
3. Karakteristik Berdasarkan Perkara <i>Citizen Law Suit</i> (CLS)	339
4. Dasar Hukum Pengajuan Hak Gugat Warga Negara (<i>Citizen Law Suit</i>)	341
5. Syarat-Syarat Pengajuan Hak Gugat Warga Negara (<i>Citizen Law Suit</i>)	342
6. Waktu, Bentuk, dan Isi Pemberitahuan	343

BAB 13 PENGADILAN NIAGA SEBAGAI LEMBAGA PENYE-

LESAIAN PERKARA KEPAILITAN	346
A. Pembentukan Peradilan Niaga	346
B. Pengertian Kepailitan.....	349
C. Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga.....	350
D. Kompetensi Pengadilan Niaga.....	351
1. Kompetensi Relatif	351
2. Kompetensi Absolut	351
E. Praktik Peradilan Niaga Perkara Kepailitan	352
1. Acara di Pengadilan Dilakukan dengan Tulisan/ Surat	352
2. Kewajiban dengan Bantuan Ahli Hukum	352
3. Hakim Bersifat Pasif	353
4. Pembuktian Sederhana	353
5. Batas Waktu Pemeriksaan	353
6. Putusan Bersifat Serta-Merta	354
7. Tidak Tersedia Upaya Banding	354
F. Klausul Arbitrase	354
G. Hakim Pengadilan Niaga.....	355
H. Acara Pemeriksaan Kepailitan.....	356
I. Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Pernyataan Pailit	357
J. Proses Peninjauan Kembali (PK)	358
K. Simulasi Perkara Kepailitan	360
1. Persiapan Permohonan Pailit	360
2. Tahapan Permohonan Pailit	361
3. Contoh Bentuk Surat Kuasa Khusus dan Surat Permohonan Pailit	362
L. Mediasi di Pengadilan Niaga.....	402
1. Ketentuan Mediasi Secara Umum	402
2. Ketentuan Mediasi di Pengadilan Niaga	403
3. Mediasi Bukan Keharusan	404
M. Prosedur dan Mekanisme Mengajukan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	405
N. Hukum Acara HAKI pada Pengadilan Niaga	411

BAB 14 HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA	414
A. Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha.....	414
1. Pasar Persaingan Sempurna (<i>Fair Competition/ Perfect Competition</i>)	416
2. Pasar Monopoli	416
3. Pasar Monopoli Persaingan (<i>Monopolistic Competition Market</i>)	417
4. Pasar Oligopoli	417
B. Dugaan Adanya Pelanggaran Undang-Undang	418
C. Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang	420
D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	423
E. Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha dalam UU No. 5 Tahun 1999	425
F. Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010.....	429
1. Laporan	429
2. Perkara Inisiatif	431
G. Mekanisme (Proses) Beracara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	432
1. Siapa Pelaku Usaha, Saksi, dan Pihak Lain	432
2. Macam Pemeriksaan	433
3. Hukum Acara	434
4. Tahap Pemeriksaan	434
5. Mekanisme Proses Pemeriksaan di KPPU	435
6. Upaya Hukum	437
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2003	438
H. Prosedur Beracara di KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)	439
DAFTAR PUSTAKA	447
PROFIL PENULIS	451